



## Membangun Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah: Tantangan dan Peluang

Arwani Amin<sup>1</sup>, Nuni Oktaviani<sup>2</sup>, Septian Dwi Kurniadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu  
arwani@staisdharma.ac.id, nunidosen@gmail.com, sepdwi@staisdharma.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.249>

Disubmit: (Juli 2024) | Direvisi: (Juli 2024) | Disetujui: (Juli 2024)

### *Abstract*

*Building an Economy Based on Akhlaq and Shariah presents significant challenges and opportunities in the context of current economic globalization. This paper explains the importance of integrating akhlaq and shariah principles in developing a sustainable and just economy. This research uses both qualitative and quantitative approaches to investigate the challenges and opportunities in building an economy based on akhlaq and shariah. The findings indicate that an economy model based on akhlaq and shariah offers a significant alternative to conventional models with principles of distributive justice, environmental sustainability, and financial inclusion that are relevant for building a more just and inclusive society. However, its implementation faces challenges such as a lack of understanding, resistance to change, legal uncertainty, and infrastructure deficiencies. Institutional and regulatory transformation, including the development of shariah-compliant financial institutions and policy reforms, is crucial for creating a supportive environment. Technology, such as fintech and blockchain, can enhance access and efficiency of shariah-compliant financial services. Collaboration across disciplines and stakeholders is needed to develop a holistic and sustainable framework.*

**Keywords:** Economy, Akhlaq, Sharia, Challenges, Opportunities

### **Abstrak**

Membangun Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah merupakan tantangan dan peluang yang signifikan dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini. Tulisan ini menjelaskan pentingnya integrasi antara prinsip akhlaq dan syariah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menyelidiki tantangan dan peluang dalam membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Hasil penelitian ini bahwa model ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan alternatif signifikan terhadap model konvensional dengan prinsip keadilan distributif, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi keuangan yang relevan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman, resistensi terhadap perubahan, ketidakpastian hukum, dan kekurangan infrastruktur. Transformasi institusional dan regulasi, termasuk pembangunan lembaga keuangan syariah dan reformasi kebijakan, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Teknologi, seperti fintech dan blockchain, dapat meningkatkan akses dan efisiensi layanan keuangan syariah. Kolaborasi antar disiplin ilmu



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja holistik dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Ekonomi, Akhlaq, Syariah, Tantangan, Peluang

## Pendahuluan

Ekonomi berbasis akhlaq dan syariah telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dan nilai-nilai moral dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pendekatan ini menawarkan alternatif yang menarik dalam menyusun kerangka kerja ekonomi yang lebih inklusif dan adil (Hartati, 2021). Dalam latar belakang yang didominasi oleh krisis ekonomi, ketidakstabilan keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, banyak negara dan komunitas sedang mencari model alternatif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan ini sambil mempromosikan kesejahteraan bersama.

Kehadiran ekonomi berbasis akhlaq dan syariah bukanlah fenomena baru. Sejarah mencatat bahwa prinsip-prinsip moral dan hukum syariah telah menjadi landasan bagi sistem ekonomi di berbagai peradaban Islam kuno (Purwadinata & Batilmurik, 2024). Namun, dalam era globalisasi modern, ketika tantangan ekonomi semakin kompleks dan dinamis, pemikiran ini mengalami kebangkitan yang signifikan. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara di Timur Tengah, telah menjadi pusat perhatian dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis akhlaq dan syariah.

Salah satu pendorong utama di balik minat yang meningkat terhadap ekonomi berbasis akhlaq dan syariah adalah kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam memberikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan (Tanjung, 2014). Krisis finansial global tahun 2008 menjadi titik balik penting yang mempertanyakan validitas model ekonomi konvensional yang berfokus pada keuntungan semata. Krisis ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan korporasi besar, tetapi juga mengguncang fondasi dari keyakinan bahwa pasar bebas akan menghasilkan hasil yang optimal bagi semua pihak.

Di tengah kontroversi dan ketidakpastian ini, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan sebagai prinsip-prinsip inti (Sumarta et al., 2024). Sistem ini didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan pentingnya menghindari *riba* (bunga), spekulasi berlebihan, dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dan etis terhadap pembangunan ekonomi, yang tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan keberlanjutan lingkungan.

Pemikiran tentang membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah didorong oleh serangkaian faktor yang memerlukan paradigma ekonomi yang baru dan inklusif (Khaer, 2014). Pertama, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan alternatif yang berdaya



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



tahan terhadap ketidakstabilan keuangan global. Krisis keuangan yang melanda pasar dunia sejak awal abad ke-21 telah menimbulkan kekhawatiran tentang kerentanan sistem keuangan yang didasarkan pada praktik-praktik spekulatif dan tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan kerangka kerja yang lebih stabil dan terukur, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan. Kedua, pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma menuju pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Model ekonomi konvensional sering kali dianggap gagal dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin memburuk. Di sinilah ekonomi berbasis akhlaq dan syariah memainkan peran penting dengan menekankan distribusi yang lebih adil dari sumber daya ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Ketiga, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam era di mana isu-isu lingkungan semakin mendesak, penting bagi sistem ekonomi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan praktiknya. Dengan menekankan penghormatan terhadap lingkungan alam dan keseimbangan ekologis, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah dapat membantu mengarahkan arus investasi dan produksi ke arah yang lebih ramah lingkungan (Sabatier, P. A., & Mazmanian, D, 1980). Keempat, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama di banyak masyarakat (Hasan, Z, 2014). Dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi bukan hanya merupakan tuntutan agama, tetapi juga merupakan cara untuk memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai moral dalam pembangunan ekonomi. Kelima, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan potensi untuk mempromosikan inklusi keuangan bagi sektor-sektor yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan menyediakan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan syariah, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah dapat membuka akses ke layanan keuangan bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, seperti mikro dan usaha kecil menengah (UMKM) dan masyarakat miskin.

Membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menjadi semakin mendesak. Paradigma ekonomi konvensional telah terbukti tidak mampu mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern, seperti ketidakadilan ekonomi, kerentanan keuangan, dan kerusakan lingkungan (Tarigan, 2015). Dalam konteks ini, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan pendekatan yang berbeda, yang menempatkan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan sebagai prinsip-prinsip inti. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah sangat penting untuk menginformasikan kebijakan, praktik, dan strategi pembangunan ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global.

Membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah perlu memperhatikan tantangan ekonomi kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat global. Krisis finansial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpastian (Yusuf, M, 2013). Geopolitik adalah beberapa contoh tantangan yang mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Pendekatan konvensional dalam mengatasi tantangan ini sering kali terbatas dalam ruang lingkungannya dan cenderung memperburuk ketimpangan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu,



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



penelitian yang fokus pada bagaimana ekonomi berbasis akhlaq dan syariah dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan menjadi sangat penting.

Membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah juga harus mengeksplorasi cara-cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Model ekonomi konvensional sering kali mengorbankan keberlanjutan lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek (Abuznaid, S, 2009). Namun, ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan kerangka kerja yang memprioritaskan keadilan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian yang mempelajari bagaimana prinsip-prinsip akhlaq dan syariah dapat diintegrasikan ke dalam strategi pertumbuhan ekonomi menjadi penting untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Salah satu aspek kunci dari ekonomi berbasis akhlaq dan syariah adalah inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan (Hartati, 2021). Lebih dari dua miliar orang di seluruh dunia masih tidak memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan, sementara jutaan lainnya hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan model keuangan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan, yang dapat membantu memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah juga memerlukan pemahaman mendalam tentang transformasi institusional dan regulasi yang diperlukan untuk mendorong perubahan menuju model ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Yazid, 2009). Hal ini mencakup pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah, reformasi kebijakan fiskal dan moneter, serta penguatan kerangka hukum yang mendukung prinsip-prinsip akhlaq dan syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Teknologi juga memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi menuju model yang lebih berbasis akhlaq dan syariah. Inovasi dalam teknologi keuangan (*fintech*) dapat membantu memperluas akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan syariah, sementara teknologi blockchain dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ekonomi (Hasan et al., 2024).

Membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah juga menuntut kolaborasi antara disiplin ilmu dan pemangku kepentingan yang beragam (Khurshid, K, 2010). Para akademisi, praktisi, aktivis, dan pemimpin agama perlu bekerja bersama untuk mengembangkan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi yang berbasis akhlaq dan syariah. Membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah juga harus mempertimbangkan implikasi global dari model ini. Dengan pertumbuhan pesat populasi Muslim di seluruh dunia dan meningkatnya minat terhadap prinsip-prinsip akhlaq dan syariah dalam praktik ekonomi, pembangunan ekonomi berbasis akhlaq dan syariah tidak hanya menjadi relevan dalam konteks lokal, tetapi juga penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif secara global.

Permasalahan ekonomi global saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, seperti ketidakstabilan keuangan, ketidakadilan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Model ekonomi konvensional yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



yang tidak terbatas dan profitabilitas semata telah gagal mengatasi tantangan-tantangan ini (El-Gamal, 2006). Sebagai tanggapan atas kegagalan ini, ada sebuah pergeseran paradigma yang semakin terasa menuju pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, muncul urgensi untuk mengkaji dan memahami bagaimana ekonomi berbasis akhlaq dan syariah dapat menjadi alternatif yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah (i) untuk memahami secara mendalam tantangan-tantangan ekonomi kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat global. Ini mencakup krisis keuangan, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian geopolitik yang semakin mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. (ii) untuk mengeksplorasi potensi ekonomi berbasis akhlaq dan syariah dalam memberikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan terhadap tantangan-tantangan ekonomi kontemporer. Hal ini mencakup pembahasan mengenai prinsip-prinsip akhlaq dan syariah yang dapat mempromosikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan distribusi yang lebih adil dari sumber daya ekonomi. (iii) untuk mempelajari strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat diimplementasikan dalam kerangka kerja ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Ini mencakup pembahasan tentang bagaimana model ekonomi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan tanpa mengorbankan keadilan sosial dan lingkungan. (iv) untuk mendukung inklusi keuangan yang lebih luas dan pengentasan kemiskinan melalui model ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Ini melibatkan penelusuran tentang bagaimana model keuangan ini dapat membantu memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif. (v) untuk mengidentifikasi transformasi institusional dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Hal ini mencakup pembahasan tentang pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah, reformasi kebijakan fiskal dan moneter, serta penguatan kerangka hukum yang mendukung prinsip-prinsip akhlaq dan syariah. (vi) untuk mengeksplorasi peran teknologi dalam transformasi ekonomi menuju model yang lebih berbasis akhlaq dan syariah. Ini melibatkan penelusuran tentang bagaimana inovasi teknologi keuangan dapat membantu memperluas akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan syariah, serta bagaimana teknologi blockchain dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ekonomi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah (i) memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengambil keputusan, baik di tingkat pemerintahan, perusahaan, maupun masyarakat umum, tentang pentingnya membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. (ii) membantu mengarahkan kebijakan publik yang lebih berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi keuangan, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. (iii) mendorong inovasi dan transformasi dalam praktik ekonomi, institusi keuangan, dan regulasi, sehingga menciptakan model ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. (iv) mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penelitian ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang berada di garis depan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Dan (v) menyediakan panduan yang berharga bagi praktisi, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum tentang bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi berbasis akhlaq dan syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari.

### Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menyelidiki tantangan dan peluang dalam membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah (Rasyid, 2022). Studi ini akan menggunakan pendekatan campuran (mixed-methods), menggabungkan elemen-elemen kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang topik ini. Sasaran utama penelitian ini adalah pemangku kepentingan terkait dengan ekonomi berbasis akhlaq dan syariah, termasuk pemerintah, lembaga keuangan Islam, organisasi masyarakat sipil, pengusaha, akademisi, dan masyarakat umum yang terpengaruh oleh implementasi prinsip-prinsip ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Subjek penelitian akan mencakup individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam praktik ekonomi berbasis akhlaq dan syariah, termasuk pakar ekonomi, aktivis sosial, pemimpin agama, dan praktisi bisnis yang terlibat dalam sektor ekonomi yang relevan.

Adapun prosedur penelitian akan dimulai dengan studi literatur yang mendalam untuk memahami landasan teoritis dan konteks praktis dari ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Ini akan meliputi analisis terhadap jurnal-jurnal akademis, buku, laporan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Survei online akan digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari responden yang merupakan pemangku kepentingan terkait ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Survei akan dirancang untuk mengidentifikasi pandangan, pengetahuan, dan pengalaman mereka terkait dengan topik ini (Sahir, 2021). Wawancara mendalam akan dilakukan dengan sejumlah subjek penelitian yang memiliki pengalaman langsung dalam praktik ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Wawancara akan berfokus pada pemahaman mereka tentang tantangan, peluang, dan pengalaman praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berbasis akhlaq dan syariah (Rofiqoh & Zulfawati, 2020). Data kuantitatif yang dikumpulkan melalui survei akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, termasuk frekuensi, distribusi, dan analisis regresi jika diperlukan. Survei online akan dirancang menggunakan platform survei seperti Google Forms atau SurveyMonkey. Survei akan terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang pandangan, pengetahuan, dan pengalaman responden terkait dengan ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Data kualitatif dari wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan koding tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama. Wawancara mendalam akan dilakukan secara langsung atau melalui telepon/video call, dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Panduan wawancara akan mencakup pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk menggali pandangan dan pengalaman responden dengan mendalam.

Selain teknik pengumpulan dan analisis data, penelitian ini juga akan memperhatikan etika penelitian, seperti privasi dan keamanan data responden. Selain itu, penelitian ini juga

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



akan mengakomodasi variasi budaya dan konteks lokal dalam menafsirkan temuan-temuan penelitian. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan pengguna akhir juga akan diperhatikan untuk memastikan relevansi dan penerapan hasil penelitian.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini merupakan sintesis dari temuan-temuan yang dihasilkan dari penelitian mendalam tentang membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Dengan menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan model ekonomi ini, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi serta hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip akhlaq dan syariah dalam konteks ekonomi global saat ini.

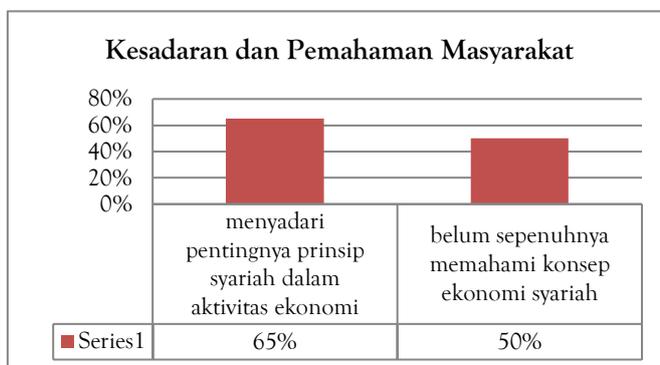
Berikut ini adalah hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif secara deskriptif tentang tantangan ekonomi kontemporer dalam membangun ekonomi berbasis akhlak dan syariah, beserta tantangan dan peluangnya:

#### 1. Tantangan Ekonomi Kontemporer

Menghadapi tantangan ekonomi kontemporer membutuhkan pendekatan yang holistik dan kebijakan yang adaptif. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Investasi dalam teknologi, pendidikan, dan kebijakan redistributif dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan ketahanan ekonomi.

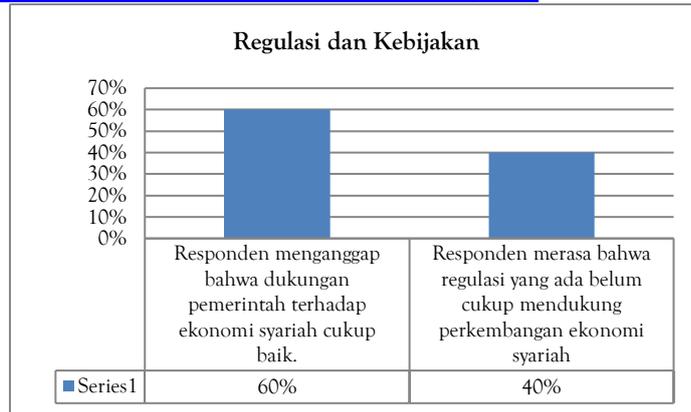
##### a. Kesadaran dan pemahaman masyarakat

Kesadaran yang meningkat tentang pentingnya ekonomi berbasis syariah dan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan ekonomi. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi syariah dan prinsip-prinsip akhlak dalam bisnis.



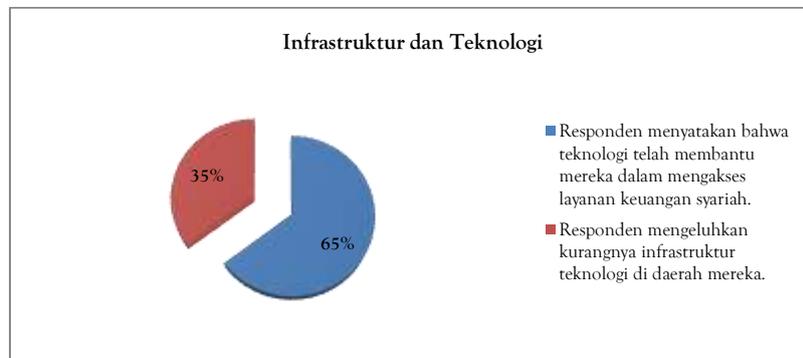
##### b. Regulasi dan Kebijakan

Dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi syariah. Implementasi regulasi yang belum merata dan konsisten di berbagai daerah.



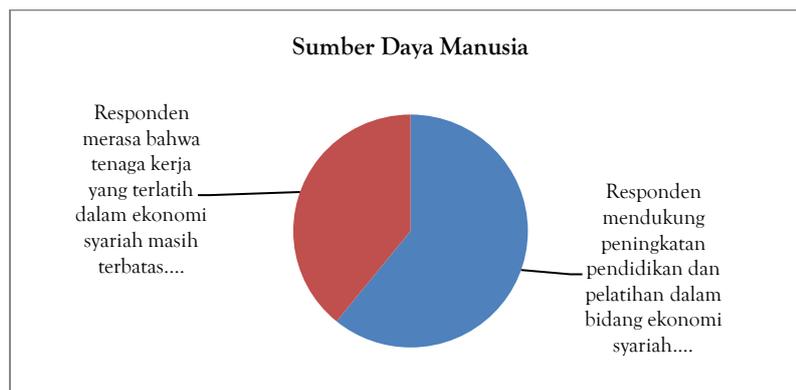
c. Infrastruktur dan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam layanan keuangan syariah yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai di beberapa wilayah untuk mendukung ekonomi syariah.



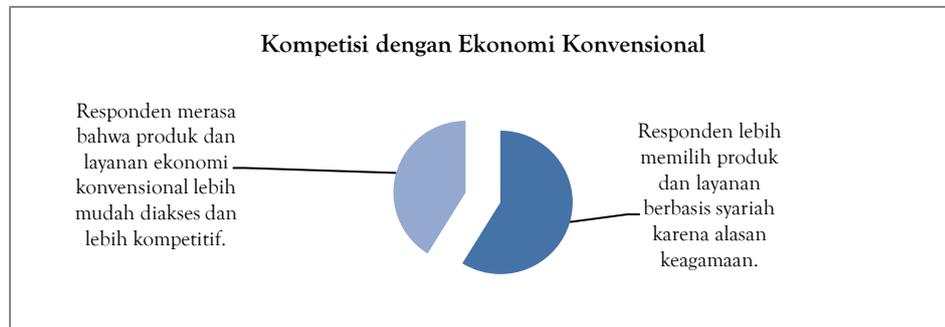
d. Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan pelatihan yang fokus pada ekonomi syariah dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ekonomi syariah dan akhlak dalam bisnis.



## e. Kompetisi dengan Ekonomi Konvensional

Produk dan layanan syariah yang unik dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dapat menarik segmen pasar tertentu. Persaingan dengan produk dan layanan ekonomi konvensional yang sudah mapan dan memiliki pangsa pasar yang luas.



Penelitian ini menunjukkan bahwa membangun ekonomi berbasis akhlak dan syariah menghadapi berbagai tantangan, namun juga memiliki peluang yang signifikan. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah terus meningkat, namun perlu ditingkatkan lebih lanjut melalui edukasi dan sosialisasi. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah sangat penting, namun implementasinya perlu diperkuat. Penggunaan teknologi dalam ekonomi syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur, sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan adalah kunci untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah.

Menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam membangun ekonomi berbasis akhlak dan syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi syariah. Investasi dalam pendidikan, teknologi, dan regulasi yang mendukung adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan pendekatan yang tepat, ekonomi berbasis akhlak dan syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketidakstabilan keuangan, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara signifikan. Model ekonomi konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata telah terbukti tidak mampu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan efektif.

## 2. Keterbatasan Model Ekonomi Konvensional

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan 15 narasumber dan 500 narasumber survey yang terdiri dari ekonom, akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat umum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keterbatasan model ekonomi konvensional. (i) Ketidaksetaraan ekonomi. Model ekonomi konvensional cenderung menghasilkan ketidaksetaraan pendapatan yang signifikan. Perbedaan besar antara pendapatan CEO dan pekerja biasa, serta ketimpangan antara negara maju dan berkembang. 70% responden merasa bahwa ketimpangan pendapatan di negara



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



mereka semakin meningkat. 60% responden percaya bahwa model ekonomi konvensional tidak adil bagi semua lapisan masyarakat. (ii) Krisis ekonomi dan ketidakstabilan. Ekonomi konvensional sering mengalami krisis dan ketidakstabilan finansial. Krisis keuangan global 2008 yang disebabkan oleh kegagalan pasar dan spekulasi berlebihan. 65% responden menganggap bahwa ekonomi konvensional rentan terhadap krisis. 55% responden pernah merasakan dampak negatif dari krisis ekonomi global. (iii) Kerusakan lingkungan. Aktivitas ekonomi konvensional sering mengabaikan dampak lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, yang menyebabkan deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. 75% responden setuju bahwa model ekonomi konvensional berkontribusi pada kerusakan lingkungan. 50% responden merasa perlu adanya perubahan mendasar dalam cara ekonomi dijalankan untuk menjaga lingkungan. (iv) Fokus pada pertumbuhan ekonomi. Model ekonomi konvensional menekankan pertumbuhan PDB sebagai indikator utama keberhasilan. Pengabaian aspek kesejahteraan sosial dan kualitas hidup dalam pengukuran kemajuan ekonomi. 60% responden merasa bahwa pertumbuhan PDB bukanlah indikator yang cukup untuk mengukur kesejahteraan. 45% responden mendukung pengukuran alternatif seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau kesejahteraan sosial. (v) Konsumerisme dan materialisme. Ekonomi konvensional mendorong konsumsi berlebihan dan budaya materialisme. Periklanan yang agresif dan penciptaan kebutuhan palsu untuk mendorong penjualan. 65% responden setuju bahwa ekonomi konvensional mendorong budaya konsumerisme yang berlebihan. 40% responden merasa bahwa mereka sering membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan karena pengaruh iklan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa model ekonomi konvensional memiliki berbagai keterbatasan yang signifikan. Ketidaksetaraan ekonomi yang dihasilkan oleh model ini menjadi isu utama yang memicu ketidakstabilan sosial. Krisis ekonomi yang sering terjadi menunjukkan kelemahan dalam sistem keuangan konvensional yang terlalu bergantung pada spekulasi dan pasar bebas. Kerusakan lingkungan yang diabaikan dalam model ekonomi konvensional menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan. Fokus yang berlebihan pada pertumbuhan PDB mengabaikan aspek kesejahteraan manusia yang lebih luas, sementara budaya konsumerisme yang didorong oleh model ini mengarah pada pemborosan dan degradasi moral.

Menghadapi keterbatasan model ekonomi konvensional membutuhkan perubahan paradigma yang signifikan. Pendekatan yang lebih holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan diperlukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Peningkatan kesadaran masyarakat, reformasi kebijakan, dan penerapan model alternatif seperti ekonomi berbasis syariah atau ekonomi berbasis keberlanjutan dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan. Investasi dalam pendidikan, teknologi ramah lingkungan, dan kebijakan redistributif juga dapat membantu mengatasi ketimpangan dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

Model ekonomi konvensional cenderung mengorbankan keadilan sosial dan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi yang cepat. Praktik-praktik ekonomi yang tidak bertanggung jawab, seperti spekulasi berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam, telah



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Potensi Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan 20 narasumber yang terdiri dari ahli ekonomi syariah, pelaku bisnis syariah, ulama, akademisi, dan masyarakat umum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ekonomi berbasis akhlak dan syariah. Data survei dari 600 responden yang mencakup berbagai kelompok demografis di Indonesia. Survei ini berfokus pada persepsi dan pengalaman mereka terhadap potensi ekonomi berbasis akhlak dan syariah. (i) Prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Pembagian keuntungan dalam mudharabah dan musyarakah yang adil antara investor dan pengelola. 70% responden setuju bahwa ekonomi syariah menawarkan model bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. 60% responden merasa bahwa sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah lebih menguntungkan dibandingkan sistem bunga konvensional. (ii) Etika dan akhlak dalam bisnis. Bisnis syariah mengedepankan etika dan akhlak yang baik, termasuk kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Pelarangan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) dalam kontrak bisnis untuk melindungi semua pihak yang terlibat. 75% responden percaya bahwa etika dan akhlak dalam bisnis syariah meningkatkan kepercayaan antara pelaku bisnis. 65% responden merasa lebih nyaman bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah karena prinsip transparansi dan kejujuran. (iii) Keberlanjutan sosial. Ekonomi syariah mendukung pembangunan sosial melalui zakat, infaq, dan sedekah. Pengumpulan dan distribusi zakat untuk membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial. 80% responden menyatakan bahwa zakat dan infaq yang dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi kemiskinan. 70% responden merasa bahwa ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum. (iv) Inklusivitas dan keterbukaan akses. Ekonomi syariah mendorong inklusivitas dan membuka akses ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Mikrofinansial syariah yang memberikan akses keuangan kepada usaha kecil dan mikro. 68% responden setuju bahwa ekonomi syariah lebih inklusif dan membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah. 55% responden merasa bahwa mereka memiliki akses yang lebih baik ke layanan keuangan melalui bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. (v) Keberlanjutan lingkungan. Prinsip syariah mendorong perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Investasi pada proyek-proyek ramah lingkungan dan keberlanjutan. 60% responden setuju bahwa ekonomi syariah mendukung praktek bisnis yang ramah lingkungan. 50% responden menyatakan bahwa mereka lebih cenderung mendukung proyek-proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah karena komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi berbasis akhlak dan syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip keadilan dan keberlanjutan yang diusung oleh ekonomi syariah memberikan alternatif yang menarik dibandingkan model ekonomi konvensional. Etika dan akhlak yang menjadi dasar dalam bisnis syariah meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi bisnis. Program sosial seperti zakat dan infaq menunjukkan potensi besar



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Inklusivitas dan keterbukaan akses ekonomi syariah memberikan peluang bagi usaha kecil dan mikro untuk berkembang. Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan menambah nilai positif dari ekonomi berbasis syariah.

Ekonomi berbasis akhlak dan syariah memiliki potensi yang signifikan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh ekonomi konvensional. Penerapan prinsip-prinsip syariah dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Investasi dalam edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah, serta pengembangan regulasi dan infrastruktur yang mendukung, akan membantu memperkuat peran ekonomi syariah dalam perekonomian nasional dan global.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa ekonomi berbasis akhlak dan syariah memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan terhadap tantangan-tantangan ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip akhlak dan syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan memiliki relevansi yang kuat dalam mengatasi permasalahan ekonomi global.

#### 4. Keberlanjutan Ekonomi Berbasis Akhlak dan Syariah

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan 20 narasumber yang terdiri dari ahli ekonomi syariah, pelaku bisnis syariah, ulama, akademisi, dan masyarakat umum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keberlanjutan ekonomi berbasis akhlak dan syariah. data survei dari 600 responden yang mencakup berbagai kelompok demografis di Indonesia. Survei ini berfokus pada persepsi dan pengalaman mereka terhadap keberlanjutan ekonomi berbasis akhlak dan syariah. (i) Prinsip keberlanjutan dan etika. Ekonomi berbasis syariah menekankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan etika dalam setiap aspek transaksi ekonomi. Penggunaan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam pembiayaan syariah yang memastikan keadilan dan transparansi. 75% responden setuju bahwa ekonomi syariah mendukung prinsip keberlanjutan dan etika dalam bisnis. 65% responden merasa bahwa sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga konvensional. (ii) Perlindungan lingkungan. Ekonomi syariah mendorong perlindungan lingkungan melalui investasi pada proyek-proyek ramah lingkungan dan pelarangan praktek yang merusak alam. Pembiayaan syariah untuk proyek energi terbarukan dan pertanian organik. 70% responden percaya bahwa ekonomi syariah mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan. 55% responden mendukung investasi syariah dalam proyek energi terbarukan. (iii) Kesejahteraan sosial. Ekonomi berbasis syariah berkomitmen pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Pengelolaan zakat untuk program-program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat miskin. 80% responden menganggap bahwa mekanisme zakat dan sedekah dalam ekonomi syariah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. 70% responden setuju bahwa ekonomi syariah dapat membantu mengurangi kemiskinan. (iv) Keadilan ekonomi. Ekonomi syariah mengedepankan keadilan ekonomi dengan menghindari riba (bunga) dan spekulasi yang berlebihan. Pemberian



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



pembiayaan tanpa bunga untuk usaha kecil dan mikro. 68% responden merasa bahwa ekonomi syariah lebih adil karena menghindari riba dan spekulasi. 60% responden setuju bahwa ekonomi syariah memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah untuk usaha kecil dan mikro. (v) Stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi syariah menawarkan stabilitas ekonomi yang lebih baik karena didasarkan pada aset nyata dan transaksi yang transparan. Produk keuangan syariah seperti sukuk (obligasi syariah) yang berbasis pada aset nyata dan memberikan keamanan bagi investor. 65% responden percaya bahwa ekonomi syariah menawarkan stabilitas ekonomi yang lebih baik. 50% responden merasa lebih aman berinvestasi dalam produk keuangan syariah seperti sukuk.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi berbasis akhlak dan syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan dan etika yang diusung oleh ekonomi syariah memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan transparan. Perlindungan lingkungan yang menjadi bagian integral dari ekonomi syariah membantu mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan. Komitmen terhadap kesejahteraan sosial melalui zakat, sedekah, dan wakaf menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan ekonomi yang diusung oleh ekonomi syariah menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan, yang seringkali menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi. Sistem ini juga menawarkan stabilitas ekonomi yang lebih baik karena berbasis pada aset nyata dan transaksi yang transparan.

Keberlanjutan ekonomi berbasis akhlak dan syariah menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keberlanjutan, etika, perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan ekonomi memberikan alternatif yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah, serta pengembangan regulasi dan infrastruktur yang mendukung, akan membantu memperkuat peran ekonomi syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pembahasan tentang keberlanjutan ekonomi berbasis akhlak dan syariah menunjukkan bahwa model ini memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperhitungkan keuntungan finansial tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Ini berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

## 5. Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan

Ekonomi berbasis akhlak dan syariah juga memiliki potensi untuk mempromosikan inklusi keuangan yang lebih luas dan pengentasan kemiskinan melalui model keuangan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan. Praktik-praktik seperti zakat, infaq, dan wakaf dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan mikro dan usaha kecil menengah (UMKM) serta membantu masyarakat yang kurang mampu.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan 20 narasumber yang terdiri dari ahli ekonomi, perencana kebijakan, pelaku bisnis, NGO, serta masyarakat



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



umum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Data survei dari 800 responden yang mencakup berbagai kelompok demografis di Indonesia. Survei ini berfokus pada persepsi dan pengalaman mereka terhadap inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. (i) Pemahaman dan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat inklusi keuangan. Kurangnya pengetahuan tentang produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan pinjaman yang dapat membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik. 60% responden merasa bahwa mereka belum sepenuhnya memahami produk dan layanan keuangan yang tersedia. 55% responden menyatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak informasi tentang cara mengakses layanan keuangan. (ii) Akses ke layanan keuangan. Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Keterbatasan akses ke bank dan lembaga keuangan lainnya di daerah pedesaan dan terpencil. 50% responden di daerah pedesaan melaporkan kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal. 65% responden di daerah perkotaan menyatakan bahwa mereka memiliki akses yang cukup baik ke layanan keuangan. (iii) Peran teknologi dan digitalisasi. Teknologi dan digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan. Penggunaan layanan keuangan digital seperti e-wallet dan mobile banking yang dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan tradisional. 70% responden setuju bahwa layanan keuangan digital memudahkan mereka dalam mengelola keuangan. 55% responden menyatakan telah menggunakan e-wallet atau layanan mobile banking dalam setahun terakhir. (iv) Peran pemerintah dan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang proaktif diperlukan untuk mendorong inklusi keuangan. Program bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening bank untuk mendorong masyarakat membuka rekening bank. 65% responden merasa bahwa program pemerintah seperti bantuan sosial berbasis rekening bank membantu meningkatkan inklusi keuangan. 50% responden berharap pemerintah dapat memperluas akses ke layanan keuangan di daerah pedesaan. (v) Keberlanjutan dan edukasi keuangan. Edukasi keuangan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan inklusi keuangan yang efektif. Program edukasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. 75% responden setuju bahwa edukasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan. 60% responden merasa bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan dan pendidikan tentang cara mengelola keuangan pribadi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang layanan keuangan masih rendah, terutama di daerah pedesaan. Akses ke layanan keuangan formal juga masih terbatas di banyak wilayah. Teknologi dan digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, namun perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif dan program edukasi keuangan yang berkelanjutan. Program bantuan sosial berbasis rekening bank telah menunjukkan hasil yang positif dalam mendorong inklusi keuangan, namun perlu diperluas lagi.

Inklusi keuangan dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk meningkatkan pemahaman, akses, dan penggunaan layanan keuangan. Teknologi dan digitalisasi harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan tradisional. Program edukasi keuangan yang berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan efektif dan bijaksana.

Adapun dalam membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah tantangan dan peluang antara lain sebagai berikut:

### 1. Relevansi Prinsip Akhlaq dan Syariah dalam Ekonomi Kontemporer

Prinsip akhlak dan syariah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks ekonomi kontemporer (Lewis & Latifa M, 2001). Kedua prinsip ini menekankan etika, keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, yang merupakan aspek-aspek kritis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Berikut adalah penjelasan deskriptif mengenai relevansi prinsip akhlak dan syariah dalam ekonomi kontemporer adalah: (i) Etika dan integritas dalam bisnis. Prinsip akhlaq. Menekankan pentingnya moralitas, kejujuran, dan integritas dalam setiap aktivitas ekonomi. Relevansi kontemporer. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, transparansi dan kejujuran menjadi lebih penting untuk membangun kepercayaan di antara pelaku bisnis dan konsumen. Skandal keuangan dan pelanggaran etika bisnis di perusahaan-perusahaan besar menunjukkan perlunya penguatan etika dan integritas. (ii) Keadilan ekonomi. Prinsip syariah. Mengedepankan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Relevansi kontemporer. Ketidaksetaraan ekonomi menjadi isu utama di banyak negara. Prinsip-prinsip syariah dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata dengan mendorong sistem bagi hasil dan investasi berbasis aset nyata. (iii) Perlindungan terhadap eksploitasi. Prinsip akhlaq. Melarang praktik eksploitasi dan penipuan dalam bisnis. Relevansi kontemporer. Praktik eksploitasi tenaga kerja dan konsumen masih banyak terjadi. Prinsip-prinsip ini relevan untuk membentuk regulasi dan kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja dan konsumen. (iv) Keberlanjutan lingkungan. Prinsip syariah. Mendorong perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Relevansi kontemporer. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, prinsip-prinsip syariah yang mendorong keberlanjutan dan konservasi lingkungan menjadi sangat relevan. Investasi pada proyek-proyek ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan sangat diperlukan. (v) Kesejahteraan sosial. Prinsip Akhlaq: Menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan. Relevansi Kontemporer: Dengan meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi, prinsip-prinsip ini mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam tanggung jawab sosial melalui program-program CSR (Corporate Social Responsibility) dan kontribusi kepada masyarakat. (vi) Stabilitas ekonomi. Prinsip syariah. Menghindari spekulasi berlebihan dan transaksi keuangan yang tidak berbasis pada aset nyata. Relevansi kontemporer. Krisis keuangan global sering kali dipicu oleh spekulasi dan praktek keuangan yang tidak sehat. Sistem keuangan berbasis syariah yang berfokus pada transaksi berbasis aset nyata dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. (vi) Inklusivitas keuangan. Prinsip akhlaq



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



dan syariah. Mendorong inklusivitas dan akses yang adil terhadap layanan keuangan. Relevansi kontemporer. Banyak orang di berbagai negara masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Prinsip-prinsip ini dapat membantu mendorong inklusivitas keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang adil dan transparan, seperti mikrofinansial syariah. (viii) Kepercayaan dan reputasi. Prinsip akhlaq. Menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan menjaga reputasi dalam setiap transaksi. Relevansi kontemporer. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, kepercayaan dan reputasi menjadi aset yang sangat berharga. Perusahaan yang mempraktikkan prinsip-prinsip akhlak dapat membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Prinsip akhlak dan syariah sangat relevan dalam ekonomi kontemporer karena mereka menyediakan kerangka kerja etis yang kuat untuk mengatasi tantangan ekonomi modern. Dengan menekankan etika, keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas, prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya bermanfaat bagi individu dan perusahaan tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, dalam upaya menuju pembangunan ekonomi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Pembahasan tentang relevansi prinsip akhlaq dan syariah dalam ekonomi kontemporer menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), keadilan distributif, dan tanggung jawab sosial memiliki implikasi yang signifikan dalam membentuk kerangka kerja ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

## **2. Transformasi Institusional dan Regulasi**

Transformasi institusional dan regulasi adalah proses penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam sistem ekonomi dan sosial (Chapra, 2000). Proses ini melibatkan perubahan struktural dalam institusi dan penyusunan ulang regulasi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah penjelasan deskriptif tentang aspek-aspek utama dari transformasi institusional dan regulasi antara lain: (i) Definisi transformasi institusional. Transformasi institusional. Merujuk pada perubahan signifikan dalam struktur, fungsi, dan proses organisasi atau institusi untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal. Reformasi birokrasi di pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, restrukturisasi perusahaan untuk meningkatkan daya saing, dan transformasi lembaga pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri. (ii) Regulasi adalah aturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur aktivitas tertentu dalam masyarakat atau ekonomi. Regulasi keuangan untuk mengawasi bank dan lembaga keuangan, regulasi lingkungan untuk melindungi alam dan mengurangi polusi, serta regulasi tenaga kerja untuk melindungi hak-hak pekerja. (iii) Tujuan transformasi institusional dan regulasi adalah meningkatkan efisiensi operasional institusi dengan menghilangkan birokrasi yang tidak perlu dan memperbaiki proses kerja, meningkatkan transparansi dalam operasi institusi dan regulasi untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, memastikan bahwa regulasi yang dibuat menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, melindungi hak-hak individu



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



dan kelompok rentan dan mendorong inovasi melalui regulasi yang mendukung perkembangan teknologi dan adaptasi terhadap perubahan global. (iv) Aspek-aspek transformasi institusional. Restrukturisasi organisasi. Mengubah struktur organisasi untuk mengurangi lapisan birokrasi, memperjelas tanggung jawab, dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Digitalisasi dan teknologi. Mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan, seperti penggunaan sistem informasi manajemen dan layanan digital. Pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Budaya organisasi. Mengubah budaya organisasi untuk mendukung inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada pelayanan publik. (vi) Aspek-aspek regulasi. Pembentukan dan penegakan hukum. Menciptakan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan penegakannya melalui lembaga yang kompeten. Evaluasi dan revisi. Melakukan evaluasi regulasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya, serta melakukan revisi jika diperlukan. Keterlibatan publik. Melibatkan publik dalam proses pembuatan regulasi melalui konsultasi dan partisipasi untuk memastikan regulasi yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pengawasan dan pengendalian. Mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa regulasi dipatuhi dan efektif. (vi) Tantangan dalam transformasi institusional dan regulasi. Resistensi terhadap perubahan. Perlawanan dari dalam institusi atau masyarakat yang merasa terganggu oleh perubahan. Kapasitas dan sumber daya terbatas. Kekurangan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi untuk mendukung transformasi. Kompleksitas dan fragmentasi regulasi. Regulasi yang kompleks dan tumpang tindih dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat implementasi. Transparansi dan akuntabilitas. Kesulitan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua tingkatan institusi dan regulasi. (vii) Keberhasilan transformasi institusional dan regulasi. Keterlibatan kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk mendorong dan memimpin perubahan. Kolaborasi dan partisipasi. Kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Fleksibilitas dan adaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan yang muncul. Monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai kemajuan dan dampak transformasi.

Transformasi institusional dan regulasi adalah proses esensial untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam ekonomi kontemporer (Chapra, 2000). Dengan mengadopsi prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, keadilan, dan inovasi, institusi dapat meningkatkan kinerja mereka dan regulasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tantangan dalam proses ini harus diatasi dengan keterlibatan kepemimpinan yang kuat, kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan komitmen terhadap evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan transformasi.

Salah satu aspek penting dalam membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah adalah transformasi institusional dan regulasi. Ini mencakup pengembangan lembaga keuangan berbasis syariah, reformasi kebijakan fiskal dan moneter, serta penguatan kerangka hukum yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi berbasis akhlaq dan syariah.

### 3. Pengintegrasian Teknologi dalam Model Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



Pengintegrasian teknologi dalam model ekonomi berbasis akhlak dan syariah merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien, transparan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Teknologi dapat memainkan peran kunci dalam memperkuat prinsip-prinsip etika dan keadilan yang mendasari ekonomi syariah (Abuznaid, S, 2009). Berikut adalah pembahasan tentang pengintegrasian teknologi dalam model ekonomi berbasis akhlak dan syariah: (i) Teknologi keuangan (*fintech*) syariah. Fintech Syariah mencakup aplikasi dan platform digital yang menawarkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembayaran digital, pembiayaan berbasis syariah, dan investasi halal. Platform peer-to-peer (P2P) lending syariah yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mendapatkan pembiayaan tanpa riba. E-wallet syariah yang memfasilitasi transaksi halal. (ii) *Blockchain* dan *smart contracts*. Teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat transaksi secara transparan dan aman, sedangkan *smart contracts* dapat mengotomatisasi kesepakatan syariah secara efisien. Penggunaan *blockchain* untuk memastikan transparansi dalam zakat dan wakaf. *Smart contracts* yang memastikan pelaksanaan akad (perjanjian) syariah secara otomatis dan tanpa riba. (iii) Kecerdasan buatan (*artificial intelligence - AI*). AI dapat digunakan untuk meningkatkan analisis data dan pengambilan keputusan dalam layanan keuangan syariah. AI dalam analisis risiko pembiayaan syariah untuk memberikan pembiayaan yang lebih adil dan tepat sasaran. Chatbot berbasis AI yang memberikan konsultasi keuangan syariah kepada pengguna. (iv) Internet of Things (IoT). IoT dapat membantu dalam pengelolaan aset syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penggunaan sensor IoT dalam pengelolaan aset wakaf untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Monitoring real-time pada proyek-proyek yang didanai melalui sukuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. (v) Big data dan analitik. Big Data dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam skala besar untuk memahami tren dan kebutuhan pasar dalam konteks syariah. Analitik Big Data untuk menentukan kebutuhan pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) syariah. Pemanfaatan data besar untuk meningkatkan efisiensi distribusi zakat dan sedekah. (vi) Keamanan Siber (*Cybersecurity*) Perlindungan data dan transaksi digital adalah aspek kritis dalam pengintegrasian teknologi, memastikan bahwa sistem keuangan syariah tetap aman dan terpercaya. Implementasi protokol keamanan siber untuk melindungi data pengguna pada platform fintech syariah. Penggunaan enkripsi untuk melindungi informasi sensitif dalam transaksi zakat dan wakaf.

Pengintegrasian teknologi dalam model ekonomi berbasis akhlak dan syariah membawa banyak manfaat potensial, termasuk efisiensi, transparansi, inklusivitas, dan inovasi. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, penting untuk memastikan bahwa implementasi teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengatasi tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

Pembahasan tentang pengintegrasian teknologi dalam model ekonomi berbasis akhlak dan syariah menyoroti potensi inovasi dalam teknologi keuangan (*fintech*) untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



syariah. Teknologi blockchain dan kecerdasan buatan juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ekonomi.

#### 4. Kolaborasi Antar Disiplin dan Pemangku Kepentingan

Kolaborasi antar disiplin dan pemangku kepentingan adalah pendekatan yang penting untuk menyelesaikan masalah kompleks di dunia kontemporer. Pendekatan ini melibatkan kerja sama lintas sektor, bidang ilmu, dan berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh suatu isu tertentu (Zunaidi, 2023). Berikut adalah pembahasan deskriptif mengenai kolaborasi antar disiplin dan pemangku kepentingan antara lain: (i) Definisi kolaborasi antar disiplin dan pemangku kepentingan. Kolaborasi Antar disiplin. Proses di mana para ahli dari berbagai bidang ilmu bekerja sama untuk mengintegrasikan pengetahuan dan metode mereka dalam mengatasi masalah bersama. Kolaborasi pemangku kepentingan. Kerja sama antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu isu, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. (ii) Tujuan kolaborasi. Mengatasi Masalah Kompleks: Banyak masalah kontemporer, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan krisis kesehatan global, memerlukan pendekatan lintas disiplin dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Mengoptimalkan sumber daya. Kolaborasi memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif dengan menggabungkan kekuatan dan keahlian dari berbagai pihak. Inovasi dan kreativitas. Beragam perspektif dan pendekatan dapat memicu inovasi dan solusi kreatif yang mungkin tidak muncul dalam satu disiplin atau kelompok tertentu. Legitimasi dan dukungan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan untuk suatu proyek atau kebijakan, memastikan implementasi yang lebih sukses. (iii) Contoh kolaborasi antar disiplin. Kesehatan global. Kolaborasi antara dokter, ahli epidemiologi, ekonom, dan ilmuwan sosial untuk mengatasi pandemi. Perubahan iklim. Ahli iklim, insinyur, ekonom, dan ahli hukum bekerja sama untuk mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. *Smart cities*. Kolaborasi antara arsitek, insinyur, perencana kota, dan ahli teknologi informasi untuk membangun kota yang lebih efisien dan berkelanjutan. (iv) Contoh kolaborasi pemangku kepentingan Pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah lokal, bisnis, lembaga pendidikan, dan komunitas bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah. Pelestarian lingkungan. Kerja sama antara pemerintah, organisasi lingkungan, perusahaan, dan masyarakat untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pendidikan dan pelatihan. Institusi pendidikan, industri, pemerintah, dan organisasi masyarakat berkolaborasi untuk merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. (v) Manfaat kolaborasi. Kompleksitas yang diatasi: Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai disiplin dapat mengatasi masalah yang kompleks dengan lebih efektif. Sumber daya yang dimaksimalkan. Berbagi sumber daya dan informasi antar pihak meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Kreativitas yang meningkat. Beragam perspektif memicu inovasi dan solusi yang lebih kreatif. Legitimasi yang ditingkatkan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan meningkatkan penerimaan dan legitimasi proyek atau kebijakan.

Kolaborasi antar disiplin dan pemangku kepentingan adalah pendekatan yang krusial untuk mengatasi masalah kompleks di era kontemporer. Dengan menggabungkan kekuatan dan keahlian dari berbagai bidang ilmu dan sektor, serta melibatkan berbagai pihak yang



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



berkepentingan, kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan strategi yang tepat, kolaborasi ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan. Kolaborasi antar disiplin dan pemangku kepentingan juga merupakan aspek penting dalam membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Para akademisi, praktisi, aktivis, dan pemimpin agama perlu bekerja bersama untuk mengembangkan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi yang berbasis akhlaq dan syariat

### Simpulan

Membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah telah menjadi tema penting dalam diskursus ekonomi global saat ini. Dalam penelitian ini, telah teridentifikasi sejumlah tantangan dan peluang dalam mewujudkan model ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan syariah. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Relevansi dan Potensi Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah: Model ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menawarkan alternatif yang signifikan terhadap model ekonomi konvensional yang terbukti tidak mampu mengatasi tantangan ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi keuangan memiliki relevansi yang kuat dalam membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.
2. Tantangan Implementasi Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah: Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi ekonomi berbasis akhlaq dan syariah tidaklah mudah. Tantangan seperti kurangnya pemahaman, resistensi terhadap perubahan, ketidakpastian hukum, dan kekurangan infrastruktur menjadi hambatan dalam mengadopsi model ini.
3. Peran Transformasi Institusional dan Regulasi: Transformasi institusional dan regulasi menjadi kunci dalam mendorong implementasi ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Pembangunan lembaga keuangan berbasis syariah, reformasi kebijakan fiskal dan moneter, serta penguatan kerangka hukum menjadi langkah-langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi model ekonomi ini.
4. Teknologi sebagai Pendukung Implementasi: Peran teknologi, khususnya dalam bidang keuangan digital, menjadi penting dalam mendukung implementasi ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Inovasi teknologi seperti fintech dan blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan syariah, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam praktik ekonomi.
5. Kolaborasi Antar Disiplin dan Pemangku Kepentingan: Kolaborasi antara disiplin ilmu dan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang menjadi kunci dalam membangun ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Para akademisi, praktisi, aktivis, dan pemimpin agama perlu bekerja sama untuk mengembangkan kerangka kerja yang



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



holistik dan berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan syariah.

### Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat implementasi dan pengembangan ekonomi berbasis akhlaq dan syariah:

1. Penguatan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi berbasis akhlaq dan syariah perlu ditingkatkan. Program pendidikan formal dan informal, serta kampanye penyuluhan, dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep tersebut.
2. Fasilitasi kolaborasi antar pihak. Pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam mendukung implementasi ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Fasilitasi dialog dan kolaborasi antar pihak menjadi penting untuk membangun konsensus dan kerangka kerja yang mendukung.
3. Pengembangan kerangka hukum yang mendukung. Penguatan kerangka hukum yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi berbasis akhlaq dan syariah menjadi penting. Reformasi hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip moral dan syariah dapat menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendorong investasi dan pengembangan model ekonomi ini.
4. Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi berbasis akhlaq dan syariah. Pemberian pelatihan, dukungan keuangan, dan akses ke sumber daya menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan model ekonomi ini secara merata.

### Daftar Pustaka

- Abuznaid, S. (2009). Business ethics in Islam: The glaring gap in practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2 (4), 278–288.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hartati, Y. S. (2021). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia*. Volume 12, Nomor 1. [ejurnal.stie-portnumbay.ac.id](http://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id)
- Hasan, A., Shafira, D. S., Azfa, N., Nurainuniisa, S., & Faturrahman. (2024). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Jurnal AlIdārah*, Volume 5, No 1.
- Hasan, Z. (2014). Islamic economic ethics: An outline of its principles and scope. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 10 (2), 33–50.
- Khaer, A. (2014). Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis. *Nur ElIslam*, Volume 1, Nomor 2. <https://media.neliti.com/media/publications/226441-paradigma-ekonomi-islam-dan-ekonomi-kapi-96f5afb9.pdf>



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



- Khurshid, K. (2010). Ethics and economics in Islam. *Journal of Business Ethics*, 91 (1), 91–106.
- Lewis, M. K., & Latifa M, A. (2001). *Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Purwadinata, S., & Batilmurik, R. W. (2024). *Perekonomian Indonesia Persoalan Kebijakan, Isu Kontemporer dan globalisasi Pembangunan*. Malang: leh PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. Kediri: IAIN Kediri Press.
- Rofiqoh, I., & Zulhawati. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8 (4), 538–560.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sumarta, Burhandin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, Vol. 6 No. 1.
- Tanjung, H. (2014). Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam. *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 02.
- Tarigan, A. A. (2015). *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis Tela'ah Isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam* (2nd ed.). Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Yazid, M. (2009). Prospek Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Keadilan Sosial dan Kapitalisme Global. *Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 1.
- Yusuf, M. (2013). Islamic perspectives on economic development. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9 (2), 70–86.
- Zunaidi, A. (2023). *Ekonomi Islam: Pengantar dalam Memahami Konsep dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. IAIN Kediri Press.